



UPAYA HEDGING INDONESIA MELALUI PENUNDAAN KONTRAK PENGADAAN JET TEMPUR SU-35 RUSIA

Dominggos Novendry L. Tobing¹⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha²⁾, Putu Ratih Kumala

Dewi³⁾ ^{1,2,3)} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Ketidakpastian geopolitik mengharuskan negara untuk terus meningkatkan kapabilitasnya pada berbagai aspek, termasuk militer. Indonesia pun turut dalam upaya ini, salah satunya melalui rencana untuk mendatangkan jet tempur Su-35 dari Rusia. Akan tetapi, kontrak tersebut mengalami penundaan dan memunculkan pertanyaan mengenai strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal, khususnya dari Amerika Serikat melalui CAATSA. Penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan dan pertimbangan Indonesia untuk menunda kontrak tersebut. Lebih lanjut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori hedging, penelitian ini menelusuri strategi Indonesia dalam menavigasi kepentingan nasional di tengah persaingan pengaruh global. Dari penelitian ini didapati bahwa penundaan kontrak pengadaan jet tempur Su 35 dari Rusia merupakan langkah hedging yang mencerminkan fleksibilitas dan pragmatisme kebijakan luar negeri Indonesia. Tidak hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek, melalui keputusan ini juga Indonesia membentuk fondasi jangka panjang menuju kemandirian industri pertahanan nasional.

Kata-kunci : Amerika Serikat, CAATSA, Indonesia, hedging, Rusia, Su-35.

Abstract

Geopolitical uncertainty requires countries to continue to improve their capabilities in various aspects, including the military. Indonesia is also participating in this effort, one of which is through plans to purchase Su-35 fighter jets from Russia. However, the contract has been postponed, raising questions about Indonesia's foreign policy strategy in dealing with external pressure, particularly from the United States through CAATSA. This study aims to explore the reasons and considerations behind Indonesia's decision to postpone the contract. Furthermore, using a qualitative approach and hedging theory, this study examines Indonesia's strategy in navigating national interests amid global power competition. The study found that the postponement of the Su-35 fighter jet procurement contract from Russia is a hedging strategy that reflects the flexibility and pragmatism of Indonesia's foreign policy. Beyond focusing on short-term interests, this decision also lays the groundwork for long-term efforts toward achieving self-reliance in the national defense industry.

Kontak Penulis

Dominggos Novendry L. Tobing

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. PB. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali

80234 Telp: 0000 Fax: 0000

E-mail : dominggos.novendry043@student.unud.ac.id

PENDAHULUAN

Situasi geopolitik dunia yang dinamis

menuntut setiap negara untuk beradaptasi, terutama dalam aspek keamanan dan pertahanan. Kapabilitas militer menjadi komponen vital bagi negara untuk menghadapi ancaman eksternal maupun internal. Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis di kawasan Asia-Pasifik, dituntut untuk terus meningkatkan kapabilitas militernya agar seimbang dengan negara lain di kawasan.

Peningkatan kapabilitas militer biasanya dilakukan melalui modernisasi alutsista, pengembangan strategi pertahanan, serta peningkatan kualitas personel. Namun, industri pertahanan Indonesia masih menghadapi keterbatasan anggaran dan kapasitas riset (Nastitie, 2023). Hal ini membuat ketergantungan terhadap pengadaan alutsista dari luar negeri tidak dapat dihindari.

Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak tanpa terikat pada satu blok kekuatan (Santoso, 2023). Prinsip ini memungkinkan diversifikasi pengadaan alutsista dari berbagai vendor. Pengalaman embargo militer Amerika Serikat pada 1992–2005 pun menjadi pelajaran bahwa ketergantungan pada satu negara dapat melemahkan kesiapan TNI dan membatasi akses terhadap pendidikan militer (Inkiriwang, 2020).

Sebagai langkah diversifikasi, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan jet tempur Su-35 dari Rusia pada tahun 2018 (Stocker, 2018). Jet ini direncanakan menggantikan F-5 Tiger yang sudah usang. Namun, hingga kini kontrak tersebut belum juga direalisasi, bahkan menghadapi ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS) melalui Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

CAATSA merupakan instrumen hukum AS yang menargetkan Rusia, Iran, dan Korea Utara, serta negara lain yang melakukan transaksi pertahanan dengan mereka (U.S. Department of Homeland Security, 2021). Tekanan ini menunjukkan pengaruh great powers yang dapat membatasi ruang gerak negara non great power seperti Indonesia dalam menentukan kebijakan luar negeri.

Sebagai negara yang tergolong non-

great power, Indonesia dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi, Indonesia ingin memperkuat kapabilitas pertahanan melalui diversifikasi alutsista. Di sisi lain, Indonesia harus menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat sebagai mitra dagang dan keamanan. Kondisi ini membuat kebijakan luar negeri Indonesia cenderung normatif dan terkesan “main aman” (Syahdami & Rofii, 2021).

Keputusan menunda kontrak Su-35 didasari oleh berbagai faktor. Tekanan CAATSA diduga sebagai alasan utama, sementara pertimbangan keuangan saat pandemi Covid-19 juga disebut sebagai faktor tambahan (TASS Russian News Agency, 2024). Penundaan ini memunculkan spekulasi apakah kontrak ini akan dibatalkan atau hanya ditunda.

Melalui kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu, ditemukan respons Indonesia terhadap penundaan kontrak Su-35, pengaruh CAATSA terhadap diplomasi pertahanan, serta strategi alternatif yang ditempuh. Misalnya ada literatur “Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Penundaan Pengiriman Pesawat Tempur Sukhoi Su-35 Oleh Rusia Tahun 2019” oleh Fajrin (2020), “Keputusan Indonesia Menunda Implementasi Kontrak Pembelian Jet Tempur Su-35 dari Rusia Tahun 2019 - 2021” oleh Febriantini (2022), “The Influence of The United States CAATSA Policy On Indonesian Defense Diplomacy” oleh Jayadi & Pratama (2023), “Counter Adversaries America Through Sanction Act as Indonesia's Barriers in Purchasing Sukhoi Su-35” yang ditulis oleh Widyatmoko & Almubaraq (2022), dan “Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Undang Undang Countering Americas' Adversaries Through The Sanction Act (CAATSA)” oleh Santoso (2023). Beberapa penelitian ini menekankan bahwa Indonesia harus aktif berdiplomasi agar mendapat pengecualian dari CAATSA, sementara yang lain menyoroti diversifikasi alutsista sebagai solusi.

Studi perbandingan dengan kasus di India dan Turki menunjukkan bahwa kedua negara memiliki bargaining power lebih besar sehingga mampu melanjutkan pengadaan alutsista Rusia meski menghadapi CAATSA.

DIKSHI Vol. x No. x, Bulan Tahun| 3

D.N.L.Tobing, A.A.B.S.W. Nugraha, P.R.K. Dewi

Beberapa di antaranya adalah literatur berjudul “CAATSA Act and Indian Defense Sector: A

Comprehensive Analysis” yang ditulis oleh Gurdit Singh (2023), “Indo-US Relationship In CAATSA”

oleh Mahata (2023), “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement” oleh Prasititi (2019), dan “S400s, Sanctions And Defiance: Explaining Turkey’s Quest For Strategic Autonomy And The US Response” oleh Yetim & Hazar (2023). Dari beberapa literatur tersebut, didapati bahwa India tetap membeli sistem pertahanan S-400 dan mendapat waiver (pembebasan sanksi), sementara Turki tetap membeli S-400 meski terkena sanksi. Indonesia, dengan bargaining power yang lebih kecil, memilih strategi moderat melalui penundaan.

Dalam kerangka teori hubungan internasional, hedging menjadi konsep yang relevan untuk menjelaskan sikap Indonesia. Hedging dipahami sebagai strategi jalan tengah antara balancing dan bandwagoning (Kuik, 2021: 301). Negara yang melakukan hedging tidak menyatakan keberpihakan secara penuh, melainkan berusaha mengurangi risiko dengan langkah saling mengimbangi dan diversifikasi.

	<i>Balancing</i>	<i>Bandwagoning</i>	<i>Hedging</i>
Keberpihakan pada tingkat makro	Berpihak sepenuhnya pada satu <i>great power</i> dan melawan yang lainnya.	Berpihak sepenuhnya pada satu <i>great power</i> tanpa perlawanan.	Tidak berpihak/netral/ <i>multi-alignement</i> .
Pendorong utama	<i>Security-seeking</i> : mengimbangi kekuatan terbesar atau yang paling mengancam.	<i>Utility-seeking</i> : memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi ancaman keamanan.	<i>Insurance-seeking</i> : mengurangi dan mengimbangi risiko; mengembangkan alternatif.
Cara utama	Jalur militer, yaitu bergabung dalam aliansi dan memperkuat persenjataan.	Jalur politik, yaitu menampilkan kesepakatan dalam segala hal terhadap <i>great power</i> .	Semua jalur yang tersedia digunakan untuk saling mengimbangi.
Kondisi terdahulu	Adanya kepastian ancaman dan pendukung utama.	Adanya kepastian pendukung atau ancaman utama.	Tidak adanya kepastian dalam kondisi struktural (ancaman yang tersebar, dukungan yang tidak pasti).

Tabel 1. Perbandingan balancing, bandwagoning, dan hedging (Kuik, 2024: 47)

Kuik (2021: 302) menekankan bahwa hedging memiliki tiga atribut utama: ketidakberpihakan, langkah saling

mengimbangi, dan diversifikasi opsi cadangan.

Hedging biasanya dilakukan oleh negara non beberapa tahap: mengorganisasi data, membaca keseluruhan data, melakukan coding tema, menghubungkan tema dengan kerangka teori, dan menyajikan hasil dalam bentuk narasi. Proses ini memungkinkan peneliti menemukan

great power dalam kondisi ketidakpastian, ketika ancaman langsung tidak ada, perbedaan ideologi tidak signifikan, dan rivalitas great powers belum mencapai konfrontasi total. Dengan demikian, penundaan kontrak jet tempur Su-35 dapat dipahami sebagai upaya hedging Indonesia. Langkah ini mencerminkan fleksibilitas dan pragmatisme kebijakan luar negeri Indonesia yang didasarkan pada prinsip bebas-aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali strategi hedging Indonesia melalui keputusan tersebut untuk menghadapi tekanan eksternal, sekaligus melihat implikasinya terhadap kemandirian industri pertahanan nasional.

METODE

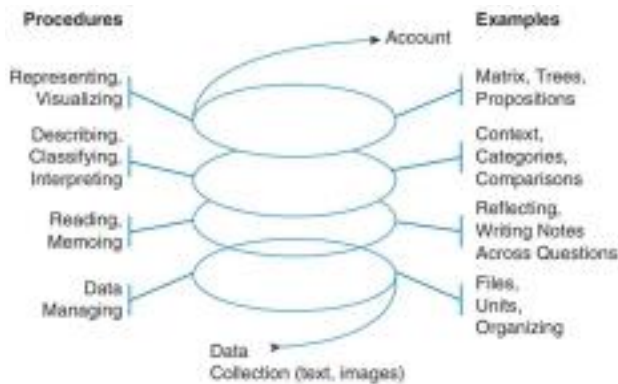
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena spesifik, yaitu penundaan kontrak pengadaan jet tempur Su-35 oleh Indonesia. Studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut serta implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri dari dokumen resmi pemerintah, pernyataan pejabat pemerintah, kontrak pengadaan, serta literatur akademik berupa jurnal, skripsi terdahulu, laporan lembaga kajian, dan berita dari media internasional maupun nasional. Data sekunder ini yang dipilih adalah yang relevan untuk menggambarkan dinamika kebijakan luar negeri Indonesia ataupun negara lain dalam menghadapi tekanan eksternal.

Unit analisis penelitian adalah Indonesia sebagai negara-bangsa, dengan fokus pada kebijakan luar negeri dan pertahanan. Analisis diarahkan pada bagaimana Indonesia sebagai non-great power menavigasi kepentingan nasional di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Rusia.

Analisis data menggunakan model spiral analisis Cresswell yang meliputi

pola dan makna dari data yang beragam.



Gambar 1. Spiral Analysis Data Cresswell
(Cresswell, 2013: 183)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Counter America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) merupakan instrumen hukum Amerika Serikat yang disahkan pada tanggal 2 Agustus 2017. Undang-undang ini bertujuan menekan Rusia, Iran, dan Korea Utara, serta negara lain yang melakukan transaksi pertahanan dengan mereka. Bagi Indonesia, keberadaan CAATSA menjadi hambatan yang cukup serius dalam rencana pengadaan jet tempur Su-35 dari Rusia. Ancaman sanksi tidak hanya berimplikasi pada sektor pertahanan, tetapi juga pada hubungan dagang dan diplomasi dengan Amerika Serikat.

Indonesia menandatangani kontrak pengadaan Su-35 sebagai bagian dari upaya diversifikasi alutsista. Jet tempur ini direncanakan menggantikan F-5 Tiger yang sudah usang. Namun, hingga kini kontrak tersebut belum terealisasi. Tekanan dari Amerika Serikat melalui CAATSA pun membuat Indonesia berada dalam posisi yang sulit: melanjutkan kontrak dengan risiko sanksi, atau menundanya dengan risiko keterlambatan modernisasi alutsista.

Kerja sama Indonesia–Rusia dalam pengadaan Su-35 sebenarnya mencerminkan hubungan yang cukup erat di bidang pertahanan. Rusia telah menjadi salah satu pemasok utama alutsista bagi Indonesia,

termasuk Su-27, Su-30, dan BMP-3F (Army Recognition, 2024; World Directory of Modern Military Aircraft, 2024). Namun, hubungan ini Pertahanan Republik Indonesia, 2021; Tentara Nasional Indonesia, 2024).

menghadapi tantangan besar akibat tekanan eksternal dari Amerika Serikat. Penundaan kontrak Su-35 menjadi simbol dilema Indonesia dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar.

Peluang Bagi Indonesia untuk Melakukan Hedging

Analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk melakukan hedging karena kondisi internasional yang ada belum mencapai titik konfrontasi total. Tidak ada ancaman langsung yang memaksa Indonesia bersekutu, tidak ada perbedaan ideologi ekstrem dengan Amerika Serikat maupun Rusia, dan juga rivalitas antara keduanya masih dalam batas diplomasi koersif. Situasi ini memberi ruang bagi Indonesia untuk bersikap fleksibel dan tidak berpihak sepenuhnya.

Hedging memungkinkan Indonesia menjaga hubungan baik dengan kedua pihak sambil tetap memperkuat kapabilitas pertahanannya. Dengan strategi ini, Indonesia dapat mengurangi risiko dari tekanan eksternal tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional secara utuh. Hedging juga memberi Indonesia kesempatan untuk menunda keputusan besar hingga kondisi internasional terlihat lebih jelas.

Sikap Ketidakberpihakan Indonesia Melalui Hedging

Sikap ketidakberpihakan Indonesia tercermin dalam upaya menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Rusia. Dengan Amerika Serikat, Indonesia tetap melaksanakan latihan militer gabungan seperti Super Garuda Shield, CARAT, dan Cope West, serta pernyataan minat untuk pembelian F-15EX (Indo-Pacific Defense FORUM, 2024; U.S. Department of State, 2025). Dengan Rusia, Indonesia tetap melanjutkan kerja sama pertahanan melalui pengadaan Su 27, Su-30, BMP-3F, serta latihan gabungan ARNEX 2021 dan Orruda 2024 (Army Recognition, 2024; World Directory of Modern Military Aircraft, 2024; Kementerian



Gambar 2. Pasukan Amerika Serikat dan Indonesia dalam Super Garuda Shield 2024
Sumber: Reynosa (2024)



Gambar 3. Opening ceremony ARNAX 2021
Sumber: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Penundaan kontrak Su-35 menunjukkan kehati-hatian Indonesia dalam menjaga keseimbangan tersebut. Indonesia tidak membatalkan kontrak, tetapi menunda implementasi untuk menghindari dampak negatif terhadap relasinya dengan Amerika Serikat. Langkah ini mencerminkan penerapan prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang berusaha menjaga fleksibilitas.

Langkah Indonesia untuk Mengimbangi Tekanan

Untuk mengimbangi tekanan CAATSA, Indonesia memilih strategi wait and see. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares, menyatakan bahwa kontrak pengadaan Su-35 tidak dibatalkan, tetapi hanya ditunda demi menghindari potensi ketidaknyamanan dan akan kembali dibahas ketika suasana sudah "lebih kondusif" (TASS Russian News Agency, 2024). Dari pernyataan tersebut ditegaskan bahwa Indonesia tidak membatalkan kontrak, tetapi menunda implementasi sembari memperkuat hubungan dengan pihak lain. Sikap ini berbeda dengan India yang tetap Hedging sebagai Tindakan Indonesia dalam Kasus Su-35

membeli sistem pertahanan S-400 dari Rusia dan mendapat pengecualian dari Amerika Serikat (Mahata, 2023; Prastiti, 2019), serta Turki yang tetap membeli S-400 meski terkena sanksi (Yetim, 2023).

Indonesia dengan bargaining power yang lebih kecil memilih langkah yang lebih aman, yakni menunda kontrak. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menghindari situasi terjebak dalam aliansi yang kaku, sekaligus menjaga hubungan baik dengan kedua pihak. Strategi ini juga memberi waktu bagi Indonesia untuk menilai perkembangan geopolitik sebelum mengambil keputusan final.

Diversifikasi dan Pengembangan Opsi Cadangan Indonesia

Diversifikasi alutsista menjadi strategi penting dalam upaya hedging Indonesia. Penandatanganan kontrak Rafale dengan Prancis, MoU pembelian F-15EX dari Amerika Serikat, serta kontrak jet tempur generasi ke-5 KAA dari Turki merupakan langkah diversifikasi yang diambil oleh Indonesia (Defence Industry Europe, 2025; Hariyanto et al., 2022; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2023; Defence Security Asia, 2025). Diversifikasi ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat bargaining power Indonesia, tetapi juga menjadi langkah menuju kemandirian industri pertahanan nasional.

Dengan diversifikasi, Indonesia tidak bergantung pada satu pihak saja. Langkah ini memperlihatkan bahwa Indonesia berusaha mengurangi risiko dari tekanan eksternal dengan memperluas partner kerja sama pertahanan. Diversifikasi menjadi bagian dari strategi hedging yang memungkinkan Indonesia menjaga fleksibilitas dalam kebijakan luar negerinya.

Di samping itu, diversifikasi juga memberi keuntungan jangka panjang berupa transfer teknologi dan peluang pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Dengan kerja sama yang lebih luas, Indonesia dapat memperkuat kapasitas produksi alutsista nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.



Gambar 4. Jet Tempur Su-35 Flanker Rusia
Sumber: Sergey Vladimirov (2012)

Penundaan kontrak Su-35 telah dinilai memenuhi atribut hedging. Pertama, Indonesia menegaskan ketidakberpihakan dengan tidak memilih salah satu pihak secara mutlak. Kedua, Indonesia melakukan langkah saling mengimbangi dengan menunda kontrak sambil memperkuat kerja sama dengan pihak lain. Ketiga, Indonesia mendiversifikasi opsi dengan membeli Rafale, F-15EX, dan KAAAN sebagai langkah alternatif lain.

Perbandingan dengan negara lain memperlihatkan perbedaan strategi. India memiliki bargaining power besar sebagai mitra strategis Amerika Serikat di Indo-Pasifik sehingga mampu melanjutkan pengadaan alutsista Rusia. Turki sebagai anggota NATO tetap membeli S-400 karena kepentingan strategis domestik. Indonesia, dengan bargaining power lebih kecil, memilih hedging sebagai strategi rasional untuk meminimalisir risiko.

Implikasi dari strategi hedging ini adalah bahwa prinsip bebas-aktif tetap relevan, tetapi membutuhkan adaptasi dalam praktiknya. Hedging memungkinkan Indonesia menjaga fleksibilitas, menghindari keterjebakan dalam aliansi kaku, dan tetap mempertahankan kredibilitas internasional. Penundaan kontrak Su-35 bukan sekadar keputusan teknis, melainkan strategi politik luar negeri yang mencerminkan pragmatisme Indonesia sebagai non-great power.

PENUTUP

Keputusan Indonesia untuk menunda kontrak pengadaan jet tempur Su-35 dari Rusia dapat dipahami sebagai bentuk strategi hedging. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa langkah ini memenuhi tiga atribut utama hedging: ketidakberpihakan, pengimbangan terhadap tekanan eksternal, serta diversifikasi opsi cadangan. Dengan strategi ini, Indonesia mampu menjaga fleksibilitas kebijakan luar negeri sekaligus meminimalisir risiko dari rivalitas Amerika Serikat dan Rusia, sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Dalam konteks tekanan CAATSA, Indonesia memilih sikap wait and see dengan menunda implementasi kontrak, sambil memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara lain. Diversifikasi melalui upaya mendatangkan Rafale dari Prancis, F-15EX dari Amerika Serikat, serta KAAAN dari Turki menunjukkan upaya Indonesia untuk memperluas pilihan alutsista dan mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Langkah ini juga ditujukan untuk memperkuat bargaining power Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.

Pendekatan hedging yang diambil Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga berorientasi untuk membentuk fondasi jangka panjang menuju kemandirian industri pertahanan nasional. Dengan memperluas mitra kerja sama dan memanfaatkan kesempatan transfer teknologi dari negara yang industri pertahanannya sudah lebih baik, Indonesia menyiapkan basis yang lebih kokoh untuk pengembangan alutsista dalam negeri.

Secara keseluruhan, penundaan kontrak Su-35 mencerminkan pragmatisme dan kehati-hatian Indonesia sebagai non-great power dalam menavigasi tekanan eksternal. Strategi hedging ini menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada prinsip bebas-aktif, menjaga otonomi strategis, dan membangun fondasi pertahanan yang lebih mandiri di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Army Recognition. (19 November 2024).
Indonesia seeks weapons and military

DIKSHI Vol. x No. x, Bulan Tahun| 7
D.N.L.Tobing, A.A.B.S.W. Nugraha, P.R.K. Dewi
equipment from Russian defense
industry. Diakses dari laman
<https://www.armyrecognition.com/new>

- s/army-news/army-news
2024/indonesia-seeks-weapons-and
military-equipment-from-russian
defense-industry
- Cresswell, J. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches.
- Defence Industry Europe. (29 Mei 2025). Indonesia signs letter of intent to buy 18 more Rafale jets, expanding defence ties with France. Defence Industry Europe. Diakses dari laman <https://defenceindustry.eu/indonesia-signs-letter-of-intent-to-buy-18-more-rafale-jets-expanding-defence-ties-with-france/>
- Defence Security Asia. (12 Juni 2025). Indonesia secures \$10 billion deal for Türkiye's KAAN stealth fighters in major defence breakthrough. Diakses dari laman <https://defencesecurityasia.com/en/indonesia-secures-10-billion-deal-for-turkiyes-kaan-stealth-fighters-in-major-defence-breakthrough/>
- Fajrin, A. A. (2020). Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Penundaan Pengiriman Pesawat Tempur Sukhoi SU 35 Oleh Rusia Tahun 2019 [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya].
- Febriantini, Y. R. (2022). KEPUTUSAN INDONESIA MENUNDA IMPLEMENTASI KONTRAK PEMBELIAN JET TEMPUR SU-35 DARI RUSIA TAHUN 2019-2021 [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. Repository UMY.
- Hariyanto, S., Salim, A., & Palupi, E. (2022). Kerjasama industri pertahanan melalui pengadaan Jet Rafale untuk memperkuat pertahanan Indonesia. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(6), 1-6.
- Hidayat, M. R. (2021). Kepentingan Indonesia Dalam Pembelian Pesawat Tempur Sukhoi Su-35 Dari Rusia Periode 2017-2019 [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Indo-Pacific Defense FORUM. (1 September 2024). Super Garuda Shield flexes multilateral, all-domain capabilities. Diakses dari laman <https://ipdefenseforum.com/2024/09/super-garuda-shield-flexes-multilateral-all-domain-capabilities/>
- Inkiriwang, F. W. (2020). The dynamic of the US–Indonesia defence relations: the 'IMET ban' period. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 377-393.
- Jayadi, U., & Hersa Putra Pratama, M. R. (2023). THE INFLUENCE OF THE UNITED STATES CAATSA POLICY ON INDONESIAN DEFENSE DIPLOMACY. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3683–3696. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1502>.
- Kuik, CC. (2008). The essence of hedging: Malaysia and Singapore's response to a rising China. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 30(2), 159-185.
- Kuik, CC. (2021). Getting hedging right: A small-state perspective. *China International Strategy Review*, 3(2), 300- 315.
- Kuik, CC. (2024). Explaining Hedging: The Case of Malaysian Equidistance. *Contemporary Southeast Asia*, 46(1), 43–76. <https://www.jstor.org/stable/27301254>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (1 Desember 2021). Indonesia bersama Rusia pimpin Latma Angkatan Laut ASEAN–Rusia. Diakses dari laman <https://www.kemhan.go.id/2021/12/01/indonesia-bersama-rusia-pimpin-latma-angkatan-laut-asean-rusia.html>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (22 Agustus 2023). Menhan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15EX baru dari AS. Diakses dari laman <https://www.kemhan.go.id/2023/08/22/menhan-prabowo-perkuat-tni-melalui-pembelian-24-pesawat-tempur-f-15ex-baru-dari-as.html>
- Mahata, M. T. K. (2023). INDO-US RELATIONSHIP IN CAATSA.

- International Journal of Multidisciplinary Educational Resesarch, 1(2), 84-86.
- Nastitie, D. P. (11 September 2023). Pengembangan industri pertahanan masih terkendala anggaran. *kompas.id*. Diakses pada tanggal 24 Januari 2025 dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/11/pengembangan-industri-pertahanan-masih-terkendala-anggaran>
- Prastiti, D. N. B. (2019). Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement Inkonsistensi Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions ACT (CAATSA): Studi Kasus Pembelian Senjata S-400 India.
- Santoso, T. A. (2023). STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI UNDANG-UNDANG COUNTERING AMERICAS'ADVERSARIES THROUGH THE SANCTION ACT (CAATSA). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 884-898.
- Singh, G. (2023). CAATSA and Indian Defence Sector. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 5(4).
- Stocker, J. (15 Februari 2018). Russia and Indonesia finalize Su-35contract. *The Defense Post*. Diakses dari laman <https://thedefensepost.com/2018/02/15/russia-indonesia-su-35-contract-finalized/>
- Syahdami, S., & Rofii, M. S. R. (2021). Studi Komparatif Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif dan Lebih Dekat ke Salah Satu Blok, Mana Yang Lebih Menguntungkan Kepentingan Nasional Indonesia?. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8141-8146.
- TASS Russian News Agency. (8 Mei 2024). Indonesian ambassador says Su-35 fighter jets contract remains in force. TASS. Diakses dari laman <https://tass.com/defense/1785383>
- Tentara Nasional Indonesia. (4 November 2024). Latma ORRUDA 2024, latihan perdana TNI AL-Russian Navy resmi dibuka. Diakses dari laman <https://tni.mil.id/view-248136-latma-orruda-2024-latihan-perdana-tni-al-russian-navy-resmi-dibuka.html>
- U.S. Department of Homeland Security. (11 Februari 2021). Countering America's Adversaries Through Sanctions Act FAQs. Diakses dari laman <https://www.dhs.gov/archive/news/2021/02/11/countering-americas-adversaries-through-sanctions-act-faqs>
- U.S. Department of State. (20 Januari 2025). U.S. security cooperation with Indonesia. Diakses dari laman <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-indonesia/>
- World Directory of Modern Military Aircraft. (3 Desember 2024). Indonesian Air Force (2025) Aircraft Inventory. Diakses dari laman <https://www.wdmma.org/indonesian-air-force.php>
- Yetim, H. T., & Hazar, A. (2023). S400s, sanctions and defiance: explaining Turkey's quest for strategic autonomy and the US response. *Southeast European and Black Sea Studies*, 23(1), 179-199